



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2025 BESERTA NOTA KEUANGAN**

Disampaikan Oleh : Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si.

Nomor Anggota : A - 436

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, khususnya atas anugerah kemerdekaan yang telah kita nikmati. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, seperti krisis energi, pangan, dan gejolak geopolitik, kita patut bersyukur masih dapat memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan hari bersejarah ini menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan perjalanan bangsa dan meneguhkan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Fraksi PKS DPR RI mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Dirgahayu Republik Indonesia. Kita harus terus semangat dan optimis dalam membangun bangsa. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Ia hadir, sebagaimana disebut dalam UUD 1945 "atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa". Ia juga hadir atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan pendiri bangsa. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada para pahlawan kita berterima kasih seraya mengirimkan doa kebaikan.

Indonesia, sebagai negara yang pernah menjadi simbol perjuangan kemerdekaan, kini menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Meskipun pernah

memimpin Konferensi Asia Afrika dan menginspirasi banyak negara, Indonesia masih terjebak dalam *'middle income trap'*. Perbandingan dengan negara-negara kawasan Asia seperti Korea Selatan dan negara tetangga Singapura menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan upaya ekstra untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan.

Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi telah membawa berbagai pencapaian bagi bangsa. Namun, kita perlu jujur mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama. Janji mewujudkan kesejahteraan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah besar yang menuntut kerja keras dan inovasi dari seluruh komponen bangsa.

"Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat", tegas Bung Hatta. Senada dengan itu, Bung Karno menyatakan, "Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita dari kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan sosial!". "Tidak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka". Kedua pernyataan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kemerdekaan adalah perjuangan yang belum selesai.

Meski telah 79 tahun kemerdekaan, cita-cita luhur para pendiri bangsa dan juga amanat konstitusi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur belum sepenuhnya terwujud. Jutaan rakyat kita masih hidup dalam kemiskinan, kekurangan gizi, dan kesulitan mengakses pendidikan. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi, serta banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi rentan. Kenyataan ini menjadi tantangan bagi kita semua, bahwa perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat masih harus dilanjutkan.

Peringatan Kemerdekaan seharusnya tidak sekadar menjadi rutinitas seremonial, tetapi harus disertai dengan pemaknaan mendalam terhadap nilai-nilai dasar serta pondasi berbangsa dan bernegara Indonesia. Memasuki usia 79 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi yang fundamental. Jika tidak dikelola dan dipersiapkan dengan baik, bonus demografi yang kita miliki berpotensi menjadi bencana demografi di masa depan, dengan risiko meningkatnya jumlah pengangguran dan tingkat kriminalitas, serta rendahnya daya saing dan produktivitas.

Pada usia 79 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita merenung dan mengingat kembali tujuan utama dari bernegara. Menjelang delapan dekade ini, apa yang telah kita kontribusikan untuk negara tercinta. Apa capaian dan prestasi yang telah kita raih. Usia 79 tahun bukanlah usia muda, dan dalam 21 tahun ke depan, republik kita akan memasuki usia

satu abad atau 100 tahun. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita wariskan kepada generasi penerus? Bagaimana kita ingin dikenang oleh anak cucu kita satu abad dari sekarang? Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan menjadi salah satu dari lima besar kekuatan ekonomi dunia, kita perlu merumuskan langkah-langkah strategis yang jelas dan berkelanjutan.

Fraksi PKS sangat optimis dan percaya bahwa dengan semangat Kemerdekaan RI semua tantangan dan permasalahan tersebut dapat diatasi semua. Selama kita bekerja bersatu-padu, bergotong-royong, dan bahu-membahu sebagai satu kesatuan anak bangsa. Selama kita memiliki mimpi, cita-cita, dan tujuan yang sama maka semua energi anak bangsa akan tertuju kepada satu tujuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga, APBN 2025 yang akan kita bahas nanti harus mengarah dan sampai kepada tujuan-tujuan tersebut. APBN 2025 harus dapat menstimulus dan berkontribusi optimal serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Hadirin yang Kami Hormati,

Fraksi PKS memandang secara umum bahwa RAPBN tahun 2025 masih membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Selanjutnya Fraksi PKS akan menyampaikan catatan-catatan secara khusus sebagai berikut:

Asumsi Makro Ekonomi

1. Fraksi PKS mengingatkan bahwa penetapan target-target tahun 2025 harus lebih kredibel dan dapat direalisasikan. Tahun 2025 merupakan periode awal pemerintahan baru, sehingga perlu membangun optimisme kepada masyarakat dan dunia usaha agar ekonomi bisa bergerak lebih cepat sehingga persoalan-persoalan sosial ekonomi maupun ketimpangan dapat diatasi lebih cepat.
2. Fraksi PKS mendorong pemerintah agar mampu memperbaiki fundamental ekonomi nasional di tengah kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan tinggi dalam rangka

mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kegagalan memperbaiki struktur ekonomi nasional akan menjebak Indonesia pada negara-negara berpendapatan menengah. Hingga saat ini Indonesia masih terjebak (*middle income trap*) 30 tahun di kelompok negara tersebut sehingga belum dapat menjadi negara maju dengan kesejahteraan yang lebih baik.

3. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat kelas bawah, menengah hingga kelas atas. Sehingga, manfaat yang dibawa dari pertumbuhan ekonomi tersebar seluruhnya ke lapisan masyarakat. Selama ini ekonomi masih digerakkan oleh kelas atas yang menyebabkan ekonomi terpusat pada kelompok tersebut.
4. Fraksi PKS mencermati bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut masih menjadi tantangan bagi ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari bagaimana koordinasi kebijakan fiskal dan moneter setelah pandemi COVID-19. Sejak 2022, baik fiskal dan moneter melakukan kebijakan uang ketat yang menyebabkan likuiditas perekonomian menyusut. Fiskal menaikkan tarif PPN sedangkan moneter menaikkan suku bunga acuan (dan penerbitan instrumen kontraksi SRBI). Hal tersebut menyebabkan ekonomi kekeringan likuiditas sehingga suku bunga tinggi tidak dapat dihindarkan. Pembiayaan ekonomi mengalami pelambatan sehingga pertumbuhan belum tercapai secara optimal.
5. Fraksi PKS berpandangan bahwa tantangan ekonomi 2025 sangat berat terutama dari sisi global. Sumber utama gejolak global berasal dari geopolitik. Geopolitik menyebabkan tekanan pada sektor lain seperti harga komoditas, kenaikan suku bunga acuan, investasi, hingga perdagangan. Gejolak-gejolak yang demikian akan memberatkan bagi perekonomian ke depan apalagi ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Kebijakan moneter negara-negara maju masih mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka panjang (*higher for longer*) yang menyebabkan investasi bergerak di sektor keuangan sedangkan sektor riil mengalami kekeringan likuiditas. Kebijakan *higher for longer* menyebabkan *cost of capital* meningkat. Situasi yang demikian membawa tekanan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, dan nilai tukar berpotensi masih tertekan.
6. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati merancang target pertumbuhan ekonomi karena komponen ini sangat berpengaruh terhadap target-target lainnya seperti penerimaan perpajakan, investasi, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Belum tercapainya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi

pencapaian target sektor lain. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi merupakan *anchor* dari seluruh target lainnya di dalam perekonomian. Fraksi PKS menilai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen masih relatif rendah, tetapi juga cukup menantang untuk dapat dicapai. Target tersebut belum menjawab kebutuhan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dalam rangka mendukung ekonomi menjadi negara maju pada 2045.

7. Fraksi PKS berpandangan bahwa salah satu tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ke depan adalah masih rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui konsumsi rumah tangga berperan lebih dari 50% terhadap PDB sedangkan investasi sekitar 29%. Dengan kontribusi tersebut maka kedua komponen tersebut akan menentukan bagaimana pencapaian ekonomi ke depan. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi bergerak di bawah pertumbuhan ekonomi. Meskipun kedua komponen tersebut berkontribusi besar terhadap PDB, akan tetapi dengan pertumbuhan yang relatif rendah maka ini akan menyebabkan ekonomi tidak bisa tumbuh maksimal. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi terjadi sejak pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi nasional sebelum sepenuhnya pulih dari pandemi covid-19.
8. Fraksi PKS berpandangan bahwa masih rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga disebabkan oleh daya beli masyarakat yang terus menurun khususnya setelah pandemi covid 19. Hal itu terpantau dari masih tingginya tingkat pengangguran serta tenaga kerja yang semakin besar terserap di sektor informal. Pada bagian lain inflasi inti cenderung menurun sedangkan inflasi bahan makanan terus meningkat. Lonjakan inflasi bahan makanan memberikan tekanan terhadap daya beli karena masyarakat membutuhkan uang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Juli 2024, inflasi inti hanya 1,95 persen sedangkan inflasi bahan makanan mencapai 3,25 persen. Sementara itu, inflasi umum mencapai 2,13 persen.
9. Fraksi PKS berpandangan pemerintah perlu fokus terhadap perbaikan sektor industri manufaktur karena sektor tersebut sangat besar kontribusinya terhadap pembentukan PDB dan penyerapan tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri manufaktur terus melambat dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Hal itu juga diikuti dengan penurunan kontribusi terhadap pembentukan PDB. Persoalan yang dihadapi manufaktur sangat berat mulai dari sisi input, proses dan output. Dari sisi input, industri manufaktur masih bergantung pada bahan baku impor sedangkan

dari sisi proses sektor ini dihadapkan pada teknologi dan mesin-mesin yang usang sehingga boros dan menyebabkan harga produk relatif lebih mahal dibandingkan produk negara lain. Sementara itu dari sisi output, sektor ini dihadapkan pada banyaknya barang impor dari negara lain.

10. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memperbaiki sektor pertanian. Sektor ini sangat penting karena menguasai hajat hidup orang banyak. Sektor pertanian mengalami penurunan yang dapat menyebabkan permasalahan signifikan bagi Indonesia baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, penerapan tenaga kerja hingga pembentukan output. Sektor pertanian belum bangkit kembali karena berbagai persoalan seperti penurunan lahan, teknologi, pembiayaan hingga perubahan iklim (El Nino). Selain itu, sumber daya manusia di sektor pertanian juga dinilai belum memadai sehingga inovasi masih relatif rendah.
11. Fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah perlu melakukan perbaikan kualitas belanja serta eksekusi anggaran. Penjadwalan eksekusi anggaran perlu diperhatikan, sehingga dapat menjamin kualitas belanja.
12. Fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif tanpa memberikan beban besar terhadap utang pemerintah. Pemerintah perlu menjamin adanya pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui *collecting more, spending better*, serta *innovative financing* secara *prudent*. Aspek *collecting more* mengarah pada kemampuan pemerintah menaikkan *tax ratio* sedangkan *spending better* pada kualitas belanja.
13. Fraksi PKS mendorong pentingnya implementasi tiga fungsi utama APBN yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi distribusi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi belanja. Sebagaimana diketahui bahwa rasio belanja negara terhadap PDB cenderung meningkat dan bergerak pada kisaran 14,6-16,8 persen. Namun, kontribusi belanja negara terhadap PDB masih relatif rendah, di bawah 10 persen. Sementara itu, di negara lain, rasio belanja pemerintah terhadap PDB sekitar 14-15 persen.
14. Fraksi PKS berpandangan bahwa tantangan berat yang dihadapi sektor ekspor ke depan sejalan pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia melambat. Pada bagian lain, ekspor Indonesia masih terkonsentrasi pada bahan baku berdaya saing rendah. Dampaknya, nilai ekspor akan mudah terkoreksi. Dalam jangkauan lebih jauh, penurunan ekspor akan menekan neraca perdagangan sehingga

menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan meningkat. Implikasinya, nilai tukar Rupiah rentan terdepresiasi.

15. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk menetapkan inflasi yang lebih rendah. Angka 2,5% masih cukup tinggi untuk mendukung ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi di tahun 2025. Inflasi menjadi komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi nasional lewat konsumsi pemerintah. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan konsumsi melemah yang pada akhirnya peranan konsumsi rumah tangga turut menurun.
16. Fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah untuk tidak hanya fokus kepada inflasi IHK. Inflasi yang mencerminkan daya beli masyarakat adalah inflasi inti dan inflasi bahan makanan. Inflasi inti yang bergerak rendah mencerminkan bahwa masyarakat daya beli masyarakat menurun yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana kontribusi mereka terhadap perekonomian. Pada sisi lain inflasi bahan makanan mencerminkan daya beli secara riil yang dihadapi oleh masyarakat. Kenaikan harga khususnya bahan baku makanan seperti beras sangat berkontribusi terhadap penurunan daya beli masyarakat yang akhirnya akan menjebak rakyat dalam kemiskinan.
17. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk fokus pada pengendalian inflasi di daerah. Data BPS menunjukkan bahwa inflasi daerah lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencerminkan bahwa daya beli di daerah relatif lebih lemah dibandingkan nasional. Hal ini mengingat daerah juga menjadi penentu pertumbuhan ekonomi nasional. Persoalan-persoalan inflasi di daerah terutama pada ketersediaan bahan makanan hingga infrastruktur perlu diselesaikan.
18. Fraksi PKS mendorong pemerintah dan Bank Indonesia untuk menetapkan nilai tukar yang lebih kuat. Nilai tukar Rp16.100 per USD masih relatif lemah sehingga belum dapat memberikan optimisme terhadap pelaku usaha. Selain itu, Fraksi PKS menghimbau pemerintah dan Bank Indonesia untuk meningkatkan cadangan devisa melalui devisa hasil ekspor (DHE) khususnya sumberdaya alam. Cadangan devisa yang rendah menyebabkan tekanan pada nilai Rupiah. Fraksi PKS juga mendorong Bank Indonesia untuk mencari alternatif kebijakan dalam mengendalikan nilai tukar Rupiah selain penetapan suku bunga acuan. Kebijakan menaikkan suku bunga acuan menyebabkan ekonomi menurun karena menaikkan *cost of capital*. Hal itu menyebabkan investasi melambat dan pertumbuhan tidak optimal.
19. Fraksi PKS mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk memacu penyaluran kredit. Pertumbuhan kredit masih relatif rendah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Dalam hal ini perbankan yang diuntungkan karena pada era suku bunga tinggi

akan memperoleh laba yang besar. Perbankan menempatkan dananya ke portofolio bebas risiko sehingga menyalurkan kredit terhambat. Bank memilih menempatkan likuiditas besar ke instrumen Bank Indonesia berupa Sekuritas Bank Indonesia (SRBI) dengan imbal hasil yang lebih tinggi dari SBN.

20. Fraksi PKS berpandangan bahwa suku bunga SBN sebesar 7,1 persen terlalu tinggi. Hal ini akan membebani fiskal ke depan. Sementara itu, potensi kenaikan suku bunga SBN masih cukup tinggi karena gejolak ekonomi global. *US Treasury Bond* (10 tahun) masih cukup tinggi sejalan dengan kebijakan *higher for longer*. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi kenaikan suku bunga SBN untuk mengendalikan defisit fiskal dan utang.
21. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mengendalikan berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan suku bunga SBN tahun 2025. Beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut seperti: (i) kebijakan suku bunga tinggi yang menyebabkan perebutan likuiditas global; (ii) ketidakpastian relaksasi kebijakan moneter AS; (iii) inflasi global yang masih jauh dari target bank sentral yang menyebabkan penyesuaian suku bunga acuan tertunda; (iv) defisit fiskal negara-negara maju masih tinggi sehingga kebutuhan utang (lewat penerbitan surat utang pemerintah) tetap tinggi.

Indikator Kesejahteraan

22. Fraksi PKS berpandangan bahwa angka dan tingkat kemiskinan belum mencapai target yang ditetapkan menjelang akhir masa pemerintahan saat ini. Berdasarkan data BPS, pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat mencapai 25,9 juta orang, dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,36 persen. Dibandingkan dengan September 2022, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,46 juta jiwa, dan dibandingkan dengan Maret 2022, penurunan mencapai 0,26 juta jiwa. Walaupun jumlah penduduk miskin telah menurun dari 28,51 juta jiwa atau 11,13 persen pada tahun 2015 menjadi 25,90 juta jiwa atau 9,36 persen pada tahun 2023, laju penurunan kemiskinan belum memenuhi target RPJMN 2020-2024, yaitu di rentang 7 persen hingga 6,5 persen.
- Fraksi PKS berpandangan bahwa target pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7-8% pada 2025 adalah positif, namun agar mencapai target yang *realible* dan optimal perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan ekonomi yang ada dan kerja keras Pemerintah. Fraksi PKS mencatat bahwa tingkat kemiskinan sebelum pandemi Covid-19 pada 2019 sebesar 9,41 persen dan pada tahun 2023

sebesar 9,36 persen. Untuk mencapai target RAPBN 2025, diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan dan program yang telah berjalan, serta memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai. Selain itu, penting untuk mengukur kemiskinan secara komprehensif, mempertimbangkan ketimpangan sosial, dan membangun strategi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan mekanisme transparansi juga menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Fraksi PKS berpandangan bahwa keberhasilan dalam mencapai target penurunan kemiskinan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, implementasi kebijakan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan.

23. Fraksi PKS mencermati bahwa ketimpangan ekonomi belum mengalami perbaikan pada masa pemerintahan sekarang. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa pemerintah belum mengoptimalkan kebijakannya terkait penanggulangan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dalam data *gini ratio* yang dirilis oleh BPS. Berdasarkan laporan BPS, *gini ratio* Indonesia pada Maret 2023 ada di angka 0,39 terdiri atas *gini ratio* perkotaan di 0,41 dan pedesaan 0,31. Jika dibandingkan dari Maret 2017 *gini ratio* berada di angka 0,39 terdiri atas *gini ratio* perkotaan di 0,41 dan pedesaan 0,32.

Fraksi PKS berpandangan bahwa target penurunan rasio gini Indonesia menjadi 0,379-0,382 pada 2025 merupakan langkah yang positif, namun agar didapat target yang optimal perlu didukung oleh kebijakan yang tepat sasaran dan komprehensif dan kerja keras Pemerintah. Fraksi PKS mencatat indeks rasio gini sebelum pandemi covid-19 adalah 0,382 dan pada 2023 sebesar 0,388. Sehingga capaian angka 0,38 seharusnya tidak begitu memberatkan Pemerintah. Mengingat juga penurunan rasio Gini yang belum signifikan di beberapa wilayah, diperlukan upaya ekstra untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang masih tinggi. Kebijakan yang efektif harus fokus pada peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi, serta memastikan implementasi program yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, upaya pengurangan ketimpangan harus diimbangi dengan strategi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan mekanisme akuntabilitas yang transparan juga menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target penurunan rasio gini.

24. Fraksi PKS memandang rencana pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem secara total sebagai tujuan yang positif. Pencapaian target nol persen ini memerlukan

perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terintegrasi. Meskipun terjadi penurunan signifikan dari 2,70% pada 2019 menjadi 1,12% pada 2023, tantangan kelompok masyarakat paling rentan masih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif. Program pengentasan kemiskinan harus dirancang dengan cermat, memastikan cakupan yang luas dan efektivitas yang tinggi. Koordinasi antar sektor, alokasi anggaran yang memadai, serta sistem pengukuran yang akurat menjadi kunci keberhasilan. Penting untuk memiliki sistem pengukuran yang akurat untuk mengidentifikasi dan memantau kemiskinan ekstrem. Metodologi pengukuran harus konsisten dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Definisi kemiskinan ekstrem harus jelas dan konsisten. Perubahan dalam definisi atau metodologi pengukuran dapat mempengaruhi hasil dan pencapaian target. Upaya untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem harus memperhitungkan potensi biaya sosial, seperti dampak terhadap kohesi sosial dan potensi dampak negatif pada kelompok yang mungkin tidak sepenuhnya mencakup kebijakan. Penurunan kemiskinan ekstrem harus disertai dengan strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, untuk memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak hanya bersifat sementara tetapi berkelanjutan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang diambil relevan dan berkelanjutan.

25. Fraksi PKS mencatat bahwa tingkat pengangguran menunjukkan penurunan secara umum setelah puncak pandemi yaitu 7,07 persen pada 2020, tetapi belum kembali ke level sebelum pandemi seperti pada tahun 2019 yaitu 5,23 persen. Fraksi PKS berpandangan bahwa target penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,5-5% pada tahun 2025 perlu dikaji secara mendalam agar target yang dibuat dapat optimal, mengingat kompleksitas tantangan ekonomi saat ini. Evaluasi terhadap tren historis, efektivitas kebijakan sebelumnya, dan kesesuaian kebijakan baru dengan kondisi pasar kerja sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan, dan program penciptaan lapangan kerja benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Program-program tersebut harus dapat mengatasi tantangan struktural dalam pasar kerja. Kebijakan harus mencakup pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, dukungan untuk usaha kecil dan menengah, serta upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Selain itu, ketersediaan sumber daya, akurasi data, dan dampak sosial ekonomi dari kebijakan yang diterapkan juga perlu dipertimbangkan. Pencapaian target tingkat pengangguran memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur ketenagakerjaan dan pelatihan. Alokasi anggaran

yang memadai dan penggunaan sumber daya yang efisien sangat penting. Pemerintah perlu menjamin ketersediaan pendanaan untuk program-program ketenagakerjaan bersifat berkelanjutan. Fraksi PKS berpandangan diperlukan perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mengatasi tantangan struktural dalam pasar kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

26. Fraksi PKS berpandangan bahwa meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,56 pada tahun 2025 merupakan target yang memerlukan perencanaan yang matang. Untuk meningkatkan IMM, pemerintah harus fokus pada kebijakan yang meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Termasuk perbaikan dalam kurikulum pendidikan, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan evaluasi terhadap kinerja IMM sebelumnya, perbandingan dengan negara lain, serta analisis terhadap kebijakan pendidikan dan kesehatan yang ada. Selain itu, diperlukan investasi yang signifikan dan berkelanjutan dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta sistem pengukuran yang akurat untuk memantau kemajuan. Penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari upaya peningkatan IMM. Meningkatkan IMM tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program-program harus dirancang untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai memberikan manfaat nyata dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Perhatian harus diberikan pada kelompok-kelompok yang mungkin tertinggal dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Upaya untuk meningkatkan IMM harus mencakup strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa manfaat dirasakan secara luas terutama di kelompok masyarakat miskin dan menengah rentan. Kemudian, Pemerintah perlu untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, target peningkatan IMM dapat dicapai dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.
27. Fraksi PKS berpandangan bahwa target pemerintah untuk mencapai Indeks NTP (Nilai Tukar Petani) 115-120 dan Indeks NTN (Nilai Tukar Nelayan) 105-108 pada tahun 2025 perlu ditingkatkan lagi. NTP pada tahun 2023 mencapai 117,76 sudah melewati target 115. Sedangkan NTN pada tahun 2023 adalah 102,46 jauh dengan indeks NTN

sebelum pandemi COVID19 sebesar 114,29. Hal ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemiskinan di nelayan adalah masih relatif tinggi, ironisnya bahwa wilayah Indonesia yang umumnya dihubungkan oleh perairan laut ternyata belum menjamin kesejahteraan nelayan. Nelayan Indonesia juga kalah produktif dari Malaysia, hasil tangkapan Nelayan Indonesia rata-rata sekitar 4,33 kilogram ikan per hari. Nelayan masih didominasi oleh SDM dengan tingkat yang relatif rendah dan teknologi yang minim. Faktor kondisi keuangan nelayan yang terbatas, menjadikan BBM, alat tangkap nelayan, dan perbekalan logistik untuk melaut sulit dijangkau karena dianggap relatif mahal.

Untuk mencapai indeks NTP dan NTN yang mensejahterakan petani dan nelayan, diperlukan strategi yang komprehensif dan kebijakan yang efektif dalam sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah harus menjamin adanya dukungan kebijakan yang memadai untuk sektor pertanian dan perikanan. Ini termasuk subsidi yang tepat, dukungan harga, perbaikan infrastruktur, dan akses pasar yang lebih baik. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian dan perikanan sangat penting. Kebijakan harus mencakup pelatihan, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan hasil dan mengurangi biaya produksi. Pencapaian target NTP dan NTN memerlukan alokasi anggaran yang memadai untuk program-program yang mendukung sektor pertanian dan perikanan. Ini termasuk dukungan untuk penelitian, pengembangan, dan infrastruktur. Pencapaian target NTP dan NTN memerlukan alokasi anggaran yang memadai untuk program-program yang mendukung sektor pertanian dan perikanan. Ini termasuk dukungan untuk penelitian, pengembangan, dan infrastruktur. Evaluasi kebijakan yang mendukung, alokasi sumber daya yang memadai, dan keterlibatan stakeholder sangat penting untuk memastikan pencapaian target yang realistis dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian target dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada.

Penerimaan Negara

28. Fraksi PKS berpandangan bahwa tantangan yang cukup sulit akan dihadapi oleh pemerintah di masa awal pemerintahan tahun 2025. Tren penerimaan negara diprediksi akan mengalami penurunan akibat mulai berakhirnya tren harga komoditas unggulan ekspor. Bank Dunia memprediksi potensi penurunan indeks harga komoditas dunia pada tahun 2024 menjadi 105,3 dan 2025 sebesar 101,6. Artinya, pemerintah perlu mendorong peningkatan basis pajak sektoral.

29. Fraksi PKS menekankan pentingnya aspek kelembagaan dan tata kelola penerimaan negara. Fraksi PKS melihat bahwa peningkatan penerimaan negara yang hanya bergantung dari sektor sumber daya alam berisiko memicu efisiensi pengeluaran publik akibat mudahnya mendapatkan pungutan pajak saat terjadi ledakan harga komoditas. Namun demikian, ketika harga komoditas turun, penyesuaian ekonomi menjadi sulit karena membengkaknya defisit anggaran, utang pemerintah, dan menyusutnya sektor manufaktur. Realisasi penerimaan pajak Indonesia sangat tergantung pada dinamika perubahan harga komoditas, di mana realisasi sering melampaui target saat harga komoditas tinggi, namun konsisten mengalami kekurangan (*shortfall*) di luar periode tersebut. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah dapat menyusun jalan keluar dari dampak penurunan harga komoditas terhadap penerimaan perpajakan. Hal ini karena potensi penurunan harga komoditas yang tidak diantisipasi akan menghambat capaian target peningkatan rasio pajak oleh pemerintah.
30. Fraksi PKS melihat bahwa penetapan target penerimaan sangat mempengaruhi rencana belanja dan strategi pembiayaan tahun berjalan. Penetapan target yang kurang akurat dapat mengganggu akuntabilitas dan perencanaan fiskal. Proyeksi penerimaan yang terlalu tinggi akan berdampak pada proyeksi penambahan belanja. Jika perencanaan penganggaran kurang tepat, potensi pemborosan belanja karena proyeksi yang keliru dapat terjadi. Realisasi penerimaan perpajakan yang lebih rendah dapat menyebabkan defisit membesar, mendorong pemerintah menerbitkan utang baru dan menambah beban bunga APBN. Sebaliknya, jika target penerimaan lebih rendah dari potensi, ekspansi fiskal yang dapat dilakukan menjadi terhambat. Oleh karena itu, penetapan target yang presisi diperlukan untuk menjaga kesinambungan fiskal Indonesia.
31. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah lebih disiplin dalam menerapkan administrasi perpajakan, terutama dalam mencegah kebocoran restitusi pajak. Tingkat kepatuhan pajak saat ini tidak lebih dari 88 persen, dengan kepatuhan wajib pajak badan hanya di kisaran 62 persen.
32. Fraksi PKS menekankan pentingnya keadilan pajak. Fraksi PKS menyoroti fenomena peningkatan jumlah orang dengan kekayaan bersih sangat tinggi (*Ultra High Net Worth/UHNNW*) di Indonesia, yang pertumbuhannya tercepat di dunia - dari 510 orang pada 2021 menjadi 556 orang pada 2022, dan diproyeksikan mencapai 651 orang pada 2027. Namun, sumbangan orang terkaya terhadap penerimaan pajak masih sangat kecil, hanya 0,00011% dari target penerimaan pajak 2023.

33. Fraksi PKS sejak awal konsisten tidak sependapat dengan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, karena dinilai semakin memukul mundur kondisi perekonomian masyarakat. Kenaikan PPN dianggap kontraproduktif dengan daya beli masyarakat yang semakin tertekan, akibat berbagai guncangan ekonomi seperti kenaikan harga BBM, bahan pokok, dan tingginya suku bunga kredit
34. Fraksi PKS menekankan pentingnya terus mendorong peningkatan pungutan pajak pada sektor-sektor yang selama ini kurang tersentuh pajak, seperti sektor ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital yang begitu masif di Indonesia memberikan potensi penerimaan pajak yang sangat besar bagi pemerintah. Berdasarkan laporan analisis Bain (2023), volume penjualan kotor (*Gross Merchandise Volume*) ekonomi digital di Indonesia pada 2025 diprediksi dapat mencapai sekitar US\$110 miliar. Namun, capaian pajak digital yang baru mencapai total Rp17,4 triliun selama empat tahun terakhir dinilai belum selaras dengan profil potensi perdagangan di sektor ini. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan upaya-upaya pemungutan pajak digital secara lebih optimal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: meningkatkan kesepakatan bilateral atas pajak digital dengan negara lain; meningkatkan validitas data ekonomi digital sebagai dasar pengukuran penerimaan perpajakan; menerapkan konsep atau tarif pajak baru yang lebih sesuai dengan karakteristik perdagangan e-commerce lintas batas. Sehingga, dengan upaya-upaya tersebut, Fraksi PKS berharap pemerintah dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital yang terus tumbuh pesat di Indonesia

Belanja Pemerintah

35. Fraksi PKS berpandangan agar kebijakan alokasi anggaran 2025 harus berfokus pada kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mampu mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang kesenjangan sosial. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih 25,22 juta orang lebih tinggi banding periode sebelum pandemi sebanyak 24,78 juta jiwa (September 2019). Jumlah pengangguran (TPT) di Indonesia per Februari 2024 masih mencapai 7,2 juta orang, dan masih terdapat 9,34 juta orang setengah pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah perlu lebih progresif untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Pemerintah perlu melanjutkan reformasi anggaran yang memiliki fokus kepada prioritas rakyat banyak dan orientasi hasil, serta *value for money* dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Efisiensi biaya birokrasi pusat dan daerah, mitigasi terhadap pelbagai kemungkinan dan kebutuhan penting-mendesak, serta memperkokoh pondasi ekonomi agar terbebas dari *middle income trap* dan bergerak jadi negara maju. Belanja Negara terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat Rp2.693,2 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp2.558,2 triliun, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp854,0 triliun, meningkat yang sebelumnya Rp919,9 triliun.

36. Fraksi PKS akan terus menerus mendorong Pemerintah untuk memberikan fokus anggaran kepada sektor yang lebih produktif dan memiliki *value for money* dari setiap dana yang dikeluarkan untuk belanja negara. Pemerintah perlu seoptimal mungkin dalam perencanaan dan penggunaan belanja negara. Fraksi PKS mencatat pada RAPBN 2025 bahwa belanja Pemerintah Pusat menurut jenis masih didominasi oleh Pembayaran Bunga Utang pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp552.854,3 miliar, naik 10,8 persen dari outlook pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024. Belanja Pegawai Rp513,2 triliun, Belanja Barang Rp342,5 triliun, setelah itu Belanja Modal Rp190,6 triliun mengalami penurunan drastis. Fraksi PKS berpandangan 21 persen anggaran dihabiskan untuk membayar bunga utang dinilai tidak sehat, fiskal semakin terbatas. Pemerintah harus melakukan rasionalisasi dari sisi tunjangan menteri hingga eselon kementerian dan lembaga sementara masih terdapat 400.000 ASN masih berkategori berpenghasilan rendah. Pemerintah juga perlu untuk lebih efisien dalam belanja barang, Pemerintah perlu melakukan penajaman proporsi belanja barang agar tidak didominasi oleh belanja barang non-operasional. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi seharusnya Pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk belanja modal.
37. Fraksi PKS berpandangan bahwa belanja modal yang menurun signifikan patut dipertimbangkan kembali, pada LKPP 2023 tercatat belanja modal sebesar Rp303,0 triliun dan pada *outlook* 2024 naik menjadi Rp338,9 triliun, Sedangkan pada RAPBN 2025 belanja modal anjlok sebanyak 56 persen menjadi hanya Rp190,6 triliun. Penurunan signifikan belanja modal dinilai kontradiktif dengan apa yang disampaikan pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2025, yang menyebut arah kebijakan belanja negara tahun 2025 salah satunya ialah penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi. Di sisi lain pemerintah menjelaskan Belanja Modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing

suatu negara, serta dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.

38. Fraksi PKS mencatat Belanja Bantuan Sosial pada RAPBN tahun anggaran 2025, Belanja Bantuan Sosial K/L direncanakan sebesar Rp147,6 triliun. Fraksi PKS mendukung pemerintah melanjutkan belanja bantuan sosial untuk membantu daya beli masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain belanja bantuan sosial, Pemerintah perlu juga membuat program yang berkelanjutan agar masyarakat miskin tersebut dapat mandiri keluar dari kemiskinan dan rentan. Fraksi PKS menilai masih terdapat kelompok kelas menengah RI turut terimbas pelemahan daya beli. Gaji mereka tertekan inflasi, tapi bukan kelompok yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Hal tersebut bisa terlihat dengan terjadinya deflasi yaitu turunnya pendapatan kelas menengah di Indonesia, sehingga menyebabkan daya beli kelas menengah mengalami penurunan berturut-turut selama enam bulan terakhir. Sehingga perlu dirumuskan perlindungan sosial bagi kelas menengah untuk konsumsi, biaya pendidikan dan kesehatan serta transportasi agar tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terhambat sehingga kemiskinan akan semakin meningkat.
39. Fraksi PKS berpandangan bahwa belanja bantuan sosial masih harus dilanjutkan sebagai salah satu instrumen untuk membantu daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai warga negara Indonesia. Selain melalui bantuan yang berbentuk tunai, usaha menjaga kesinambungan ketahanan ekonomi masyarakat juga perlu dilakukan melalui bantuan sosial yang berbasis pemberdayaan seperti program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Kewirausahaan Sosial bagi penerima manfaat yang potensial sehingga alokasi anggarannya perlu ditingkatkan. Salah satu fungsi bantuan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan hidup penerima melalui kriteria penyaluran yang produktif. Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah perlu untuk memperbaiki tata kelolanya agar dapat lebih tepat sasaran dan mempunyai pengaruh yang signifikan. Beberapa kajian menyebutkan bahwa efektifitas bansos dan turunnya angka kemiskinan masih belum optimal. Sehingga diperlukan usaha oleh pemerintah untuk dapat menyempurnakannya. Bantuan sosial harus bisa dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, dan berpegang pada prinsip berkeadilan. Pemerintah perlu memperbaiki basis data penerima seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan tata kelola pelaksanaan belanja bantuan sosial. Pemerintah harus memastikan

bahwa tidak terjadi penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan rentan apa lagi sampai penerima fiktif.

40. Fraksi PKS mendorong agar Belanja Barang difokuskan untuk belanja yang penting dan mendesak, acara seremonial dan perjalanan dinas yang tidak mendesak dapat dialokasikan kepada belanja lain yang prioritas kebutuhannya. Pada RAPBN 2025 Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp342,5 triliun. Fraksi PKS juga berpandangan agar Belanja Barang diarahkan untuk mengutamakan penggunaan barang yang diproduksi di dalam negeri termasuk koperasi dan UMKM lokal. Pemerintah diharapkan dapat mendorong masuknya produk koperasi dan UMKM masuk dalam e-katalog. Fraksi PKS juga mengingatkan agar pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin tidak menggunakan barang impor, dan barang-barang lain yang memiliki barang substitusi dengan kualitas yang sama di dalam negeri. Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan usaha-usaha lainnya sehingga defisit negara pembayaran dapat berkurang signifikan. Fraksi PKS juga mendorong agar kualitas dan tata kelola belanja barang oleh pemerintah dapat ditingkatkan. Pemerintah pun harus memperbaiki kualitas belanja Pemerintah agar tidak menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal di dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi.
41. Fraksi PKS berpendapat pentingnya penajaman alokasi anggaran pendidikan agar tepat sasaran. Dalam Nota Keuangan RAPBN tahun 2025 Pemerintah mengalokasikan Rp722,6 triliun. Sebagai pemenuhan *mandatory spending* sebesar 20 persen dari APBN. Akan tetapi alokasi anggaran pendidikan masih belum fokus pada peningkatan pendidikan serta banyak dikelola oleh kementerian/lembaga selain Kemendikbudristek. Proporsi anggaran pendidikan terbesar yaitu 47 persen atau senilai Rp346 triliun pada tahun 2025 merupakan Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah harus menjelaskan banyaknya anggaran pendidikan dikelola dan tersebar di kementerian/lembaga lainnya. Kemendikbudristek sendiri hanya mengelola sebagian kecil dari keseluruhan anggaran pendidikan. Tidak heran persoalan melambungnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bisa terjadi, demikian pula masalah jumlah ruang kelas rusak di sekolah negeri di seluruh Indonesia meningkat 26% atau setara 250.000 unit dalam setahun terakhir.
42. Fraksi PKS memandang permasalahan melonjaknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri akan menjadi permasalahan yang berpotensi terus berulang di masa depan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 2024, anggaran untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya Rp7 triliun, sementara anggaran PTKL kedinasan mencapai Rp32,86 triliun. Di sisi lain, masuknya anggaran pendidikan PTKL

kedinasan ke dalam 20 persen anggaran pendidikan tidak sesuai dengan amanat Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menyebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan PTKL kedinasan juga ikut menegaskan biaya penyelenggaraan PTKL kedinasan pada jalur pendidikan formal tak termasuk dalam 20 persen APBN yang dialokasikan ke sektor pendidikan. Belum seimbangnya alokasi anggaran pendidikan berdasar skala prioritas menjadi persoalan yang berujung pada mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa PTN. Kondisi demikian merupakan gambaran keterbatasan peran negara dalam mendanai perguruan tinggi dan menghasilkan kualitas SDM yang unggulan menuju negara maju.

43. Fraksi PKS DPR RI mencermati terkait program makan bergizi gratis (MBG). Rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk Program MBG pada tahun 2025 adalah sekitar Rp71,0 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi (*safe guarding*), dan operasional lembaga yang menangani Program MBG. Berdasarkan Pidato Presiden Indonesia dalam pengantar RAPBN dan Nota Keuangannya, anggaran MBG berpotensi dialokasikan dari anggaran pendidikan dengan istilah peningkatan gizi anak sekolah. Fraksi PKS memandang 20 persen anggaran APBN untuk pendidikan harus dijalankan sepenuhnya dengan dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena masih banyak persoalan-persoalan terkait mutu pendidikan, persoalan kesejahteraan guru, persoalan infrastruktur, sarana-prasarana sekolah yang masih memerlukan pendanaan.

Fraksi PKS berpandangan perlu adanya tata kelola yang memadai terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dilakukan Pemerintah melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/ menyusui dengan risiko anak *stunting*. Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar lebih fokus pada Program Percepatan Penurunan *Stunting* yang mengalami stagnasi dari tahun 2022 ke 2023 hanya mengalami penurunan 0,1 persen. Melihat prevalensi *stunting* pada tahun 2023 hanya 21,5 persen, maka dapat diperkirakan target 2024 14 persen akan sangat sulit tercapai. Untuk tahun 2025, Pemerintah mencanangkan 18,8 persen, yang artinya hanya turun 2,7 persen dari capaian tahun 2023. Padahal Pemerintah berkewajiban menyelamatkan anak-anak bayi-1000 hari kelahiran dari ancaman *stunting*.

Selain itu, melihat persentase rumah tangga penerima bantuan sosial berdasarkan status ekonomi (SKI 2023): Maka nampak bahwa 43,7 persen rumah tangga dengan

status ekonomi pada kuintil terbawah (Q1) dan 55,1 persen rumah tangga pada kuintil menengah bawah (Q2) tidak menerima bantuan sosial dalam 1 tahun terakhir. Ini bisa diartikan bahwa bantuan sosial termasuk pangan telah salah sasaran, sebab hampir separuh dari jumlah penduduk miskin dan hampir miskin tidak mendapatkan bantuan pangan yang dibutuhkan; Sebaliknya, masih terdapat 6,6 persen rumah tangga pada kuintil teratas (Q5) dan 21,7 persen rumah tangga menengah atas (Q4) yang justru menerima bantuan sosial di tahun 2023; artinya akses terhadap pangan bagi mereka penduduk miskin dan hampir miskin termasuk keluarga dengan baduta *stunting* tidak teratasi oleh bantuan sosial pangan. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah agar kejadian ini tidak terulang di tahun 2025 melalui Program MBG.

Selain itu, alokasi untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN di tahun 2025 tidak mengalami peningkatan masih sama dengan tahun 2022, yaitu 96,8 juta jiwa. Padahal Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang, atau berkurang 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan kembali jumlah PBI agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat inclusive-error.

44. Sepanjang periode 2019 – 2023, secara nominal anggaran pendidikan meningkat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 3,4 persen per tahun. Namun disayangkan meskipun anggaran pendidikan terus meningkat, skor Indonesia dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)* yang masih relatif rendah. OECD melaporkan hasil skor PISA Indonesia periode 2022 yang hasilnya turun cukup dalam. Bahkan, skor literasi membaca Indonesia menjadi yang terendah di antara skor PISA tahun-tahun sebelumnya. Indonesia mencatatkan peringkat PISA secara global di posisi ke-66 dari 81 negara pada 2022 atau 15 terendah di dunia. Fraksi PKS berpandangan pemerintah masih perlu melanjutkan penguatan investasi di bidang pendidikan seperti perluasan program beasiswa, pengembangan inovasi, peningkatan kualitas pendidik di satuan pendidikan, baik yang umum maupun dengan kekhasan agama, dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi, adopsi teknologi informasi komunikasi, pemajuan kebudayaan yang berlandaskan Pancasila dan penguatan perguruan tinggi kelas dunia.
45. Fraksi PKS mencermati alokasi dana riset dan pengembangan teknologi masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi menjadi kunci bagi sebuah negara untuk tumbuh menjadi negara maju. Salah satu masalah dalam pendanaan penelitian di Indonesia adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk penelitian. Sejak

tahun 2016 alokasi anggaran tidak pernah mencapai 1% dari PDB Indonesia (UNESCO, 2023). Berdasarkan Indeks Inovasi Global yang dirilis World Intellectual Property Organization yang merupakan badan dari PBB. Inovasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir berada di bawah peringkat Singapura yang menduduki peringkat (8), Malaysia (36), Thailand (43), Vietnam (44), dan Filipina (51). Sementara Indonesia sendiri bertengger di peringkat 87 dari seluruh negara lainnya di dunia.

46. Fraksi PKS berpandangan Pemerintah perlu mengoptimalkan pencapaian wajib belajar 9 dan 12 tahun dengan fokus pada pemerataan kualitas pendidikan. Alih-alih hanya mengandalkan sekolah unggulan yang cenderung menyedot anggaran, perlu ada upaya serius untuk meningkatkan kualitas seluruh satuan pendidikan. Kualitas guru menjadi kunci utama, sehingga perlu ada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain itu, kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan, termasuk tenaga penunjang, juga harus diperhatikan. Untuk efisiensi anggaran, sebaiknya anggaran fungsi pendidikan tidak dibebani dengan biaya-biaya penunjang seperti biaya pakaian seragam. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran pendidikan di berbagai kementerian/lembaga, termasuk memisahkan anggaran pendidikan pegawai kedinasan dari anggaran fungsi pendidikan. Selain itu, penting untuk mengklarifikasi secara jelas komponen apa saja yang termasuk dalam kategori anggaran pendidikan, agar anggaran tidak tersedot untuk hal-hal yang bersifat penunjang seperti infrastruktur fisik pembangunan jalan, pagar, pakaian seragam, atau konsumsi makanan bergizi. Terakhir, pemerintah perlu menyusun peta jalan pendidikan yang komprehensif yang dibahas bersama dengan para stakeholder termasuk DPR RI untuk memastikan arah dan target yang jelas secara periodik dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
47. Fraksi PKS memandang alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 yang direncanakan sebesar Rp197.8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara tahun 2025 harus dapat dioptimalkan. Alokasi yang lebih besar diharapkan akan berdampak positif terhadap akses, kualitas layanan, dan program-program kesehatan di tanah air. Studi di negara anggota Organisasi Untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukkan ada relasi yang kuat antara kenaikan angka belanja kesehatan negara dengan kenaikan angka harapan hidup masyarakat. Kenaikan 10 persen belanja kesehatan akan memberikan 3,5 bulan tambahan angka harapan hidup. Dalam periode 2019–2023 rata-rata anggaran kesehatan pada kisaran 1,1 persen saja dari PDB. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memasang patokan bahwa alokasi anggaran kesehatan setiap negara minimal 15% dari total APBN atau

setara dengan 5% dari PDB. Beberapa negara telah mengikuti ketetapan dari WHO ini dengan mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan ini sekaligus memenuhi tanggungjawabnya dalam bidang kesehatan kepada penduduknya. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran kesehatan tetap prioritas dan digunakan secara efisien. Secara umum capaian pembangunan kesehatan di wilayah Indonesia bagian Barat, terutama Jawa dan Bali lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur masih dihadapkan tingginya kejadian penyakit menular seperti kusta dan malaria, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan. Wilayah Indonesia bagian Barat menghadapi tingginya masalah kesehatan, seperti jumlah kasus tuberkulosis dan stunting. Permasalahan penyakit tidak menular semakin tinggi, ditandai prevalensi obesitas diseluruh wilayah Indonesia.

48. Fraksi mengapresiasi Pemerintah yang mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan TA 2025 sebanyak Rp 103,88 T. Namun pada tingkat K/L, adanya penurunan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 2,65 T, dari Outlook TA 2024 sebesar Rp 93,25 T menjadi hanya sebesar Rp 90,6 T perlu ditinjau kembali. Hal ini karena masih adanya kemungkinan pemberlakuan *Automatic Adjustment* di TA 2025 yang berpotensi semakin mengurangi total anggaran efektif yang dapat digunakan oleh Kementerian Kesehatan.

Terkait Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kesehatan, Fraksi PKS menyoroti komitmen Pemerintah dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan di luar DKI Jakarta, di luar Pulau Jawa, di wilayah timur Indonesia dan terutama di pulau Maluku dan pulau Papua. Capaian hingga Triwulan I 2024 masih terdapat sekitar 46,1 persen Puskesmas dengan SDM kesehatan belum sesuai standar dan masih terdapat sekitar 38 persen RSUD kab/kota yang belum memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sesuai standar (Kemkes, 2024). Namun alokasi anggaran Program Diklat Vokasi Kesehatan mengalami penurunan dari Rp 5,6 T menjadi hanya Rp 3,7 T. Selayaknya Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran secara signifikan terutama untuk Bantuan Program Pendidikan SDM Kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang) yang di tahun 2024 hanya Rp 413,8 M. Begitu juga halnya, untuk bantuan pendidikan program pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis (PPDS-PDGS) di wilayah Maluku dan Papua, yang di tahun 2024 hanya mendapatkan alokasi sebanyak Rp 1,2 M. Hal utama lainnya dalam rangka meningkatkan partisipasi tenaga medis untuk berkhidmat di wilayah timur dan pelosok nusantara, pemerintah harus mengalokasikan anggaran honorarium yang memadai termasuk menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana alat kesehatan serta teknologi

kesehatan juga fasilitas tempat tinggal, keamanan dan perlindungan untuk mereka dan keluarga.

49. Fraksi PKS memandang pemerintah masih perlu meningkatkan upaya transformasi pelayanan primer, sebagai pilar utama mewujudkan ketahanan kesehatan. Jika kita melihat kendala pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai pusat layanan primer, terdapat 18% wilayah desa di Indonesia dikategorikan sebagai wilayah sulit bahkan sangat sulit ke Puskesmas. Ditambah lagi dengan adanya Keterbatasan SPA dan SDM kesehatan di puskesmas. Sebanyak 5.237 Puskesmas memiliki kelengkapan Sarana Prasarana dan Alat di bawah 70 persen. Sehingga Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan Primer, yang menjadi garda terdepan dalam upaya promotif, preventif dan kuratif belum secara optimal berfungsi di semua daerah. Selain itu, dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 untuk penguatan sumber daya kesehatan, belum disebutkan mengenai peningkatan kesejahteraan dan jaminan keselamatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk petugas lapangan KB, dan terutama pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) termasuk pendayagunaan dokter spesialis.

50. Fraksi PKS mencermati penurunan anggaran belanja subsidi sebesar 1,5 persen dari *outlook* 2024 (dari awalnya Rp313,8 triliun menjadi Rp309,1 triliun). Belanja Subsidi terdiri atas Subsidi Energi sebesar Rp204,5 triliun dan Subsidi Non-Energi sebesar Rp104,5 triliun Pemerintah perlu membuat *road map* terhadap kebijakan subsidi agar sesuai dengan target dan tujuan dari pemerataan akses publik terhadap pembangunan. Pemerintah harus mempertahankan subsidi tarif listrik 450 VA – 900 VA, subsidi LPG tabung 3 kg, dan BBM bersubsidi bagi rakyat kecil. Kemudian, Pemerintah perlu menjaga ketersediaan dan akses LPG tabung 3 Kg, BBM bersubsidi yaitu Solar dan Premium yang sering kali dikeluhkan langka atau sulit ditemukan oleh masyarakat. Pemerintah perlu untuk menjaga tata kelola subsidi termasuk dalam perbaikan kinerja dan efisiensi di PLN dan Pertamina. Naiknya harga komoditas global dari sisi belanja akan melambungkan biaya, namun pada saat bersamaan dari sisi penerimaan berupa PNB dan Pajak seharusnya mengalami peningkatan yang signifikan juga.

Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap program subsidi non energi untuk rakyat miskin dan rentan secara berkesinambungan. Perbaikan dan pengelolaan data adalah hal yang penting sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Sehingga pemerintah diharapkan dapat menyalurkan subsidi tersebut dengan tepat sasaran. Fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah masih perlu untuk

melanjutkan program subsidi pupuk, penyediaan PSO (*Public Service Obligation*) untuk transportasi dan komunikasi, subsidi bunga KUR untuk UMKM, Penguatan Penjaminan untuk UMKM, bantuan uang muka perumahan untuk pembiayaan masyarakat berpenghasilan rendah, skema subsidi resi gudang, subsidi bunga air bersih, serta pelayanan publik lainnya mesti diberikan alokasi anggaran yang cukup dan kebijakan yang tepat. Terkait subsidi pupuk, Sejak 2019, tren belanja subsidi pupuk Indonesia menurun dari Rp34,1 triliun menjadi Rp31,1 triliun pada 2020, dan terus menurun hingga Rp25,3 triliun pada 2023. Padahal, kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani.

51. Fraksi PKS mengapresiasi adanya kenaikan anggaran ketahanan pangan menjadi sebesar Rp124,4 triliun pada RAPBN 2025. Namun demikian, ketika dicermati kenaikan tersebut lebih disebabkan adanya alokasi untuk biaya membangun bendungan, irigasi dan lain-lain sebesar 43,5 persen dari total anggaran ketahanan pangan. Sedangkan anggaran pertanian terus menurun setiap tahunnya, padahal anggaran ini berpengaruh langsung terhadap produksi pangan nasional. Anggaran ketahanan pangan yang lebih berfokus pada kepentingan infrastruktur hingga saat ini belum menjadi solusi untuk menciptakan ketahanan pangan dan masih bergantung dengan produk impor. Data mencatat impor beras per Juni 2024 telah mencapai 5,17 juta ton, sementara produksi padi mengalami penurunan sebesar 17,54 persen dibanding tahun lalu. Hal ini harus menjadi catatan pemerintah bahwa impor beras kita sudah pada fase membahayakan kedaulatan pangan sebab tahun ini angka impornya paling besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
52. Fraksi PKS mencermati alokasi anggaran belanja infrastruktur, pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun pada RAPBN 2025. Jika mengacu pada pada RPJMN 2020 – 2024 disebutkan bahwa kebutuhan belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 6.421 Triliun atau rata-rata 6.08 persen dari PDB (Perhitungan Sementara), sehingga *Stock Capital Infrastructure* akan mencapai 50 persen dari PDB di tahun 2014. Namun demikian, kemampuan penyediaan hanya sebesar 3,46 persen dari PDB, sehingga terdapat *Financing gap* yang cukup signifikan dalam hal kebutuhan pendanaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial. Seperti dalam pemenuhan layanan dasar diperlukan perluasan penyediaan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta pemenuhan air minum dan sanitasi berkualitas yang akan menjadi landasan utama untuk menjamin kehidupan yang sehat dan produktif bagi masyarakat. Kemudian infrastruktur energi dan ketenagalistrikan juga menghadapi

hambatan signifikan, ditandai dengan belum optimalnya pemenuhan akses, pasokan, dan tenaga listrik yang merata dan berkelanjutan. Diperlukan upaya serius dalam mengembangkan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (*green energy*) agar kebutuhan energi dapat terpenuhi sambil menjaga keberlanjutan alam. Tahun 2022 Indonesia masih bergantung pada batubara sebanyak 80 persen untuk pengadaan listrik. Sumber listrik ramah lingkungan Indonesia yakni tenaga air (8%), angin dan matahari (0,2%). Masih dibawah rata rata global (13%). Sementara Filipina (4%) di tahun 2023 dan Thailand (5%).

Fraksi PKS juga mencermati Pidato Presiden menyoroti dua poin utama terkait pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Pertama, Fraksi PKS menyoroti pentingnya pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) untuk mengurangi ketergantungan pada elpiji impor. Namun, realisasi pembangunan jargas belum mencapai target yang ditetapkan. Kedua, terkait pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (SDA), khususnya migas, Fraksi PKS mendorong peningkatan produksi untuk mencapai target lifting minyak 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan PNBP dari sektor SDA, realisasi produksi migas masih di bawah target. Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk menggenjot produksi migas dan mencari strategi baru agar target tersebut dapat tercapai.

53. Fraksi PKS berpandangan masih terbatasnya alokasi anggaran baik APBN maupun APBD untuk penyediaan akses air minum aman. Saat ini Indonesia sendiri masih sangat tertinggal dari banyak negara tetangga ASEAN dalam penyediaan air minum aman. Dimana pencapaian akses air minum aman baru sekitar 11,8 persen (Kemenkes, 2020) dan akses dasar air minum layak sekitar 91,05 persen, dimana angka ini sangat jauh tertinggal dari negara ASEAN lainnya. Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah di ASEAN menurut data Joint Monitoring Program (JMP) WHO-Unicef pada tahun 2017. Pada saat itu negara tetangga seperti Malaysia sudah mencapai 90 persen akses air minum aman dan tinggal 3 persen penduduk Malaysia yang hanya mendapatkan akses layak dasar air minum. Negara ASEAN lain seperti Filipina pun memiliki peringkat di atas Indonesia dimana 47 persen penduduknya telah mendapatkan akses aman air minum dan 47 persen lainnya mendapatkan akses layak dasar. Oleh sebab itu Fraksi PKS berpandangan Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan akses air minum masyarakat ini dengan meningkatkan dan memberikan porsi anggaran yang lebih besar. Selain itu Fraksi PKS juga berpandangan bahwa Pemerintah Pusat perlu memperkuat tata kelola dan

kelembagaan penyelenggaraan air minum serta meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama Sistem Penyediaan Air Minum. Kemudian, baru sebagian kecil rumah tangga mendapatkan akses terhadap pengelolaan sanitasi aman, baik pengelolaan air limbah domestik dari kakus, non-kakus, ataupun lumpur tinja. Data 2022 menyebut, masih ada 5,86 persen Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan terdapat 4,63 persen BABS secara tertutup.

54. Fraksi PKS mendorong kebijakan belanja pemerintah dengan tujuan pemerataan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pemerintah harus memenuhi janji untuk memberikan porsi yang kecil terhadap penggunaan APBN dalam pembangunan Ibukota Negara (IKN) dan lebih banyak mendorong peran swasta untuk keperluan tersebut. Fraksi PKS mengingatkan bahwa amanat penyediaan infrastruktur tidak hanya ada dalam UU IKN saja, namun juga dalam banyak UU lainnya. Sebagai contoh UU No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan amanat agar Pemerintah Pusat mengambilalih urusan pelaksanaan pembangunan jalan di daerah, apabila Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan. Hal ini dibutuhkan karena saat ini tingkat kemantapan jalan di daerah prosentasenya masih jauh lebih kecil daripada tingkat kemantapan Jalan nasional. Dimana kemantapan jalan nasional telah mencapai angka sekitar 91%, sedangkan tingkat kemantapan jalan Provinsi hanya sekitar 70% dan kemantapan jalan Kabupaten berada dikisaran angka 57% saja. Fraksi PKS mendesak pemerintah memperbaiki sektor logistik, sebab mahalnya biaya logistik dapat memengaruhi ongkos produksi yang kemudian akan menentukan harga jual produk akhir dan dapat memengaruhi pasar ekspor dan impor. Dampaknya dapat menyebabkan Indonesia kurang dapat bersaing dalam penanaman modal asing di dalam negeri. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan BPS (2023), biaya logistik Indonesia pada 2022 mencapai 14,29% dari PDB (produk domestik bruto) dengan rincian yaitu biaya transportasi 8,79%, biaya persediaan dan pergudangan 3,19%, serta biaya administrasi 2,30%. Biaya logistik tersebut masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yakni: China (14%), Filipina (13%), Malaysia (13%), India (13%), Singapura (8%), dan Jepang (8%).
55. Fraksi PKS mencermati kondisi utang BUMN yang semakin meningkat yang dikhawatirkan akan menjadi beban bagi APBN dalam hal pembiayaan atau penyertaan modal negara ketika BUMN terancam mengalami kebangkrutan/ pailit. Berdasarkan riset *Corporate and Investment Banking Natixis*, utang BUMN membengkak karena

Pemerintah secara jor-joran menggencarkan proyek infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, kereta cepat, hingga membangun ibu kota baru. Menurut Kementerian BUMN total utang BUMN mencapai Rp 1.640 triliun sepanjang tahun 2022. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap pengelolaan BUMN agar tidak merugi namun tetap memberikan kontribusi pemenuhan kebutuhan rakyat. Fraksi PKS berpandangan bahwa utang BUMN harus dikelola secara profesional dan berdasarkan kepada tata kelola yang baik. Utang BUMN dilakukan hanya untuk kebutuhan yang produktif atau penugasan Pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat umum, dan penguatan daya beli masyarakat kecil dan riskan.

56. Fraksi PKS memandang alokasi anggaran pertahanan harus berdampak langsung terutama terhadap kesejahteraan prajurit, industri pertahanan dan alutsista dalam negeri. Kesejahteraan para prajurit TNI dan Polri harus ditingkatkan terutama yang menjalankan pengabdian di daerah terpencil dan perbatasan-perbatasan negara. Secara khusus, Pemerintah perlu keseriusan untuk membangun industri pertahanan dan alutsista dalam negeri. Kemudian, anggaran fungsi pertahanan juga perlu dipertimbangkan untuk dialokasikan merespon ancaman-ancaman pertahanan non-traditional seperti kelangkaan sumber daya, *economic warfare* dan ancaman penyakit menular. Fraksi PKS memahami sekali bahwa dibalik diplomasi negara yang unggul didukung oleh pertahanan negara yang kuat. Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa anggaran belanja fungsi pertahanan harus dijaga tata kelolanya. Fraksi PKS mencermati pembelian alutsista besar-besaran yang belum dibarengi dengan pengembangan dan produksi bersama, alih teknologi, serta investasi di bidang industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Padahal dunia sudah mengakui kemampuan dan kualitas industri pertahanan dalam negeri salah satunya PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang telah memproduksi 62 unit pesawat terbang CN235 untuk kebutuhan pasar dalam dan luar negeri dengan 35 pesawat dibeli oleh berbagai negara lainnya.
57. Fraksi PKS menekankan pentingnya reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, terutama pada aspek kapasitas SDM Aparaturnya. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karenanya, penting membuat langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kebijakan belanja

Negara yang dikaitkan dengan penguatan reformasi birokrasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas, tetapi juga birokrasi yang transparan dan akuntabel yang salah satu wujudnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan mendahulukan kepentingan rakyat, terutama kelompok masyarakat yang rentan melalui afirmasi kebijakan dalam pemberian pelayanan.

Transfer ke Daerah

58. Fraksi PKS mencermati rencana Anggaran TKD sebesar Rp919,87 triliun atau meningkat Rp62,28 triliun dibandingkan APBN tahun 2024 yang sebesar Rp857,59 triliun. Peningkatan anggaran TKD dalam RAPBN 2025 membutuhkan kajian yang komprehensif untuk selanjutnya anggaran ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan ketimpangan antar daerah, termasuk kuantitas dan kualitas layanan publik di daerah. Fraksi PKS memandang penting untuk mengingatkan bahwa sesuai Pasal 1 butir ke 69, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang bersumber dari APBN, merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. TKD harus bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Fraksi PKS kembali menekankan pentingnya perhatian serius pada setiap permasalahan yang masih terjadi dari tahun ke tahun di beberapa daerah terkait pencairan dan penyaluran TKD. Harus ada solusi efektif dan mitigasi risiko mengingat setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan serta solusi yang juga berbeda. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, sangat dibutuhkan termasuk dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai jembatan untuk mengurai berbagai permasalahan yang terjadi di daerah.
59. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa *mandatory spending* pendidikan atau belanja/pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang untuk urusan pendidikan, harus dilaksanakan secara optimal dan tidak sekedar pada pemenuhan

prosentase saja. Pemerintah perlu mengintegrasikan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam setiap proses anggaran termasuk penilaian secara berkala terhadap pencapaian tujuan sehingga penggunaan anggaran *mandatory spending* berdampak nyata dan tidak hanya sekedar memenuhi angka persentase melainkan untuk mewujudkan perbaikan dan peningkatan mutu/kualitas pendidikan secara merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Alokasi dana pendidikan melalui TKD sangat besar yakni 49,9 persen di tahun 2023 dan 52,1 persen di tahun 2024 dari keseluruhan total anggaran pendidikan. Oleh karena itu, porsi anggaran pendidikan dalam TKD tahun 2025 harus dipastikan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk SDM, infrastruktur, sarana prasarana penunjang, guru dan tenaga pendidik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam ekosistem pendidikan. Hal ini diimplementasikan dengan desain anggaran pendidikan yang kuat sebagai acuan melihat output dan outcome dari anggaran pendidikan yang selama ini dimandatorikan dengan undang-undang minimal 20 persen dari total APBN. Terlebih lagi, perbaikan pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam rangka menyongsong Generasi Emas 2045. Pemerintah perlu mengambil tindakan nyata dan langkah konkret antara lain: (1) mempercepat proses sertifikasi guru dan memastikan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran; (2) Memastikan kesejahteraan guru dengan memberikan gaji yang layak dan tepat waktu, serta memberikan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil; (3) Menguatkan kebijakan yang lebih proaktif dalam mengatasi kesenjangan ekonomi, seperti pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu, peningkatan bantuan operasional sekolah, dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah tertinggal; (4) Implementasi program-program yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru yang berkelanjutan dan peningkatan fasilitas belajar mengajar. Tanpa langkah konkret dan komprehensif, kualitas pendidikan di Indonesia akan terus tertinggal, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk menciptakan SDM yang unggul serta berdaya saing di kancah global. Fraksi PKS juga kembali mengingatkan pentingnya *grand design* pendidikan nasional (termasuk tata kelola, transparansi dan akuntabilitas), mengingat anggaran pendidikan tersebar hampir di semua elemen baik pada Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD) serta Pembiayaan. Perbaikan dalam sistem pendidikan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk reformasi dalam alokasi anggaran, peningkatan kualitas pengajaran, dan pemerataan sumber daya. Berikutnya adalah terkait pemetaan kebutuhan pembiayaan dan penyediaan guru serta tenaga kependidikan yang akurat

dan komprehensif. Hal ini merupakan bagian penting dari strategi perluasan akses, peningkatan mutu, dan penguatan tata kelola satuan pendidikan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas yang akan memengaruhi kualitas layanan pendidikan. Fraksi PKS mengingatkan bahwa saat ini masih banyak daerah yang belum mendapatkan fasilitas internet, bahkan di daerah-daerah masih banyak siswa yang harus berjalan dan berjuang naik bukit untuk mendapatkan akses internet.

60. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural dimana sebagai fokus pertama, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kualitas SDM karena SDM yang unggul akan berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing suatu negara. Pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong penguatan reformasi struktural yang salah satunya untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Salah satu tantangan di bidang pendidikan sampai saat ini adalah masih rendahnya akses ke pendidikan tinggi yang ditandai dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) yang relatif rendah dimana APK PT pada tahun 2024 sebesar 39,37 persen. Angka ini masih di bawah rata-rata global yang mencapai 40 persen, bahkan lebih rendah apabila dibandingkan dengan Malaysia (43 persen), Thailand (49,29 persen), dan Singapura (91,09 persen). Salah satu kendala utama di Indonesia adalah faktor ekonomi dan tingginya biaya kuliah. Pemerintah harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul terkait lonjakan biaya kuliah, uang pangkal dan UKT di Perguruan Tinggi. Biaya kuliah yang melambung tinggi merupakan sebuah ancaman yang sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, terlebih lagi bagi kalangan menengah yang tidak mendapatkan akses bantuan apapun baik dalam bentuk bantuan perlindungan sosial maupun KIP Kuliah. Pemerintah perlu menegakkan kembali keberpihakkannya kepada rakyat dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Hal ini sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini harus ditunjukkan dengan kemampuan pengelolaan sistem pendidikan yang baik.
61. Fraksi PKS mengingatkan bahwa alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) harus mampu menyeimbangkan antara pembangunan nasional dan pembangunan di daerah, meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketimpangan baik bagi daerah penghasil, nonpenghasil, termasuk dampak eksternalitas negatifnya. Mitigasi risiko atas permasalahan yang muncul dan sering terjadi terkait DBH juga harus diperhatikan dan segera ditindaklanjuti, termasuk permasalahan penyelesaian atas kurang dan lebih bayar DBH yang berkaitan dengan ketersediaan alokasi dengan tetap memerhatikan

kapasitas fiskal di daerah. Pemerintah perlu senantiasa melakukan penguatan data, transparansi dan akuntabilitas baik dalam proses penghitungan maupun penyaluran DBH. DBH dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp192,28 triliun dan jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan alokasi DBH dalam APBN 2024 yakni sebesar Rp143,09 triliun.

62. Fraksi PKS mengingatkan tentang hasil pemeriksaan BPK terkait adanya permasalahan pada pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) melalui fasilitas *treasury deposit facility* (TDF) untuk proses penyelarasan pengaturan penetapan batas saldo kas daerah serta melakukan evaluasi dan perbaikan/penghitungan kembali atas formulasi penghitungan serta penggunaan data yang valid untuk penyaluran DBH/DAU melalui fasilitas TDF. Selain itu, Fraksi PKS juga mengingatkan tindak lanjut dan evaluasi atas rekomendasi KPK bahwa Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis harus memperbaiki dana transfer dan insentif fiskal ke daerah dalam rangka mendorong kinerja pemerintah daerah. Terkait adanya temuan KPK bahwa alokasi dana insentif daerah yang kecil dan penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, penggunaan insentif kinerja tahun berjalan yang sempit dan disalurkan menjelang akhir tahun juga harus menjadi perhatian yang serius sehingga insentif benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah penerima. Permasalahan berikutnya yang harus menjadi perhatian adalah terkait alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang menurut KPK jumlahnya masih terlalu kecil sehingga dianggap tidak efektif.
63. Fraksi PKS memberikan apresiasi atas penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah sejak awal tahun 2023 yang berarti bahwa semua penyaluran TKD sudah semakin dekat, akses layanan lebih cepat dan mudah. Penguatan pelayanan diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh daerah, termasuk kendala penyaluran, koordinasi dan konsultasi. Dengan keberadaan KPPN di daerah dihadapkan semua kendala teknis tersebut semakin cepat diselesaikan. Hal lain yang harus diperkuat adalah tentang pemahaman SDM di daerah serta teknologi informasi. Poin penting dan mendasar yang harus dipahami terkait DAU adalah kualitas data dasar untuk penghitungan formula alokasi DAU, mengingat ini akan menjadi dasar penentuan jumlah DAU yang akan diberikan kepada daerah. Formula alokasi ini harus sangat diperhatikan karena termasuk didalamnya ada potensi pendapatan daerah yang selain memperhitungkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, juga memperhitungkan Alokasi DBH dan DAK Nonfisik. Hal ini tentu harus selaras dengan

tujuan DAU yakni mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar Daerah. DAU yang direncanakan dalam RAPBN 2015 sebesar Rp446,63 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan APBN 2024 yakni sebesar Rp427,69 triliun. Pemerintah harus senantiasa mengoptimalkan DAU sebagai alokasi APBN untuk mengurangi ketimpangan antar daerah mengingat masih tingginya ketimpangan terutama wilayah daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Selain itu, penting untuk Pemerintah memberikan penjelasan serta sosialisasi berkala terkait kebijakan apa saja yang akan berpengaruh pada penyesuaian perhitungan DAU sebagaimana disebutkan dalam RAPBN 2025 sehingga tidak berdampak pada kemampuan keuangan dan layanan publik di daerah.

64. Fraksi PKS mengingatkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah sehingga dana yang diterima harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan tidak semata-mata untuk melaksanakan berdasarkan ketentuan pemerintah. Redesign pengelolaan DAK sesuai UU HKPD seharusnya fokus pada upaya mendukung penuh daerah sehingga terjadi pemerataan dan keseimbangan tingkat layanan publik antardaerah di seluruh Indonesia. DAK dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp185,24 triliun rupiah yang terdiri atas DAK fisik, DAK non-fisik, dan Hibah kepada daerah. Jumlah ini menurun dibandingkan alokasi DAK pada APBN tahun 2024 yakni sebesar Rp188,10 triliun. Fenomena permasalahan DAK terutama DAK Fisik yang hampir terjadi di sebagian besar daerah adalah terkait penyaluran DAK Fisik yang belum terlaksana secara optimal dan ini dibuktikan dengan proses persyaratan penyaluran dan penyerapan anggaran yang masih sering mengalami keterlambatan. Hal ini menjadi peringatan bagi Pemerintah pusat harus memitigasi risiko terkait kendala dan permasalahan yang sering terjadi di daerah dengan terus melakukan penguatan koordinasi serta pendampingan sehingga kinerja penyaluran dan kualitas output DAK bisa optimal.
65. Fraksi PKS kembali mengingatkan pentingnya *grand design* terkait rencana induk percepatan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah otonomi khusus yang berkesinambungan, sehingga target/capaian menjadi jelas dan terukur. Dana otonomi khusus pada RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp17,52 triliun, meliputi dana otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua, dana otsus provinsi Aceh, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus. Efisiensi, efektivitas, penguatan asistensi, supervisi, dan akuntabilitas dana otonomi khusus harus terus diperkuat dengan tujuan yang mendasar yakni tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi

pemanfaatan Dana Otsus, Fraksi PKS terus mendorong adanya penguatan pengawasan dengan melibatkan DPR, DPD, BPK, dan seluruh elemen masyarakat.

66. Fraksi PKS memandang keberadaan Dana Desa sangat penting bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa pada khususnya. Harus menjadi catatan bahwa setiap desa memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda-beda. Setiap desa harus diberikan ruang gerak pada pengelolaan Dana Desanya dengan memberikan hak untuk menentukan skala prioritas pembangunan di desa sesuai kebutuhannya. Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa terbaru) yang telah resmi diundangkan pada 25 April 2024, perlu mendapatkan perhatian serius terutama dalam beberapa hal yang berhubungan dengan alokasi anggaran baru, termasuk adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa dan tunjangan purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa yang telah mengabdikan selama minimal 20 tahun. Selain itu, dengan adanya penguatan mekanisme pengawasan pada Dana Desa, diharapkan tetap ada pendampingan, bimbingan, dan arahan yang jelas dari Pemerintah Daerah maupun Pusat, sehingga penguatan pengawasan ini tidak akan menimbulkan ketakutan desa dalam penggunaan Dana Desanya, tetapi justru akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan desa. Keberadaan Dana Desa bertujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fraksi PKS mendorong dan mendukung peningkatan Dana Desa di tahun 2025 dari sebelumnya sebesar Rp71,00 triliun di tahun 2024 (jumlah ini termasuk Rp2 triliun rupiah sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah), mengingat penguatan potensi desa bisa menjadi salah satu pemicu kekuatan ekonomi nasional. Peningkatan Dana Desa juga harus disertai dengan penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas serta pendampingan berkala dan berkelanjutan baik dari sisi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal lain yang harus diperhatikan adalah langkah mitigasi risiko terkait integrasi data keuangan desa berbasis elektronik yang harus didukung kapasitas dan integritas perangkat desa, termasuk penguatan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa. Fraksi PKS juga memberikan catatan kaitannya dengan Dana Desa yang dialokasikan untuk program paud. Harus ada kejelasan secara teknis pada penggunaan dan pelaporannya, serta indikator terkait dengan program paud yang akan dibentuk, bukan sekedar ada programnya tetapi tidak berfungsi secara optimal;

baik karena kelemahan perencanaan, pengelolaan maupun karena tidak tersedianya SDM pengajar.

67. Fraksi PKS mengingatkan pentingnya kualitas pembinaan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di tahun keempat pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Fraksi PKS juga mendorong adanya sistem monitoring dan evaluasi berkala serta berkelanjutan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas UU HKPD dalam rangka meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal nasional. Keberagaman karakteristik dan potensi di daerah juga menimbulkan disparitas potensi penerimaan pajak daerah yang berbeda dan bisa jadi tidak merata, sehingga harus ada penguatan kebijakan, regulasi dan perbaikan administrasi pajak di daerah. Dukungan sistem informasi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk menciptakan sinergi yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel antara pemerintah pusat dan daerah.
68. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah untuk terus melakukan penguatan sosialisasi dan koordinasi mengenai ketentuan-ketentuan pengelolaan TKD baik tentang aturan penyaluran anggaran (tunai atau nontunai), termasuk ketentuan dapat dilakukannya penundaan, pemotongan, dan/atau penghentian anggaran TKD beserta ketentuan lainnya. Hal ini sangat penting sehingga Daerah benar-benar paham dan mengerti secara komprehensif tata kelola TKD secara benar dan konsekuensi yang diterima apabila tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakhahaman mengenai ketentuan aturan penghitungan alokasi anggaran beserta persyaratannya masih menjadi kendala bagi banyak daerah sehingga dari tahun ke tahun masih banyak daerah yang mempertanyakan mengapa dana yang dialokasikan berbeda setiap tahunnya.

Defisit dan Pembiayaan

69. Fraksi PKS mencermati tingginya rancangan defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau -2,53 persen dari PDB. Kebijakan defisit APBN ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlangsungan fiskal. Realitanya, kebijakan defisit APBN selama satu dekade terakhir belum dapat menjadi jalan tercapainya target pertumbuhan sesuai RPJMN. Data mencatat bahwa realisasi rerata pertumbuhan 2015-2024 (jika 2024 terealisasi sebesar 5,2 persen sesuai target) hanya berkisar di angka 4,24 persen, sedangkan rerata pertumbuhan 2015-2024 menurut

RPJMN adalah 6,42 persen. Alih-alih menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, defisit APBN menjadi penyebab meningkatkan utang negara.

Kebijakan defisit yang kurang tepat dapat berdampak negatif terhadap ekonomi nasional. Defisit ditutupi dengan penerbitan surat utang negara. Pengelolaannya wajib sesuai dengan tujuan utama kebijakan defisit, yaitu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Apabila dikelola secara tidak memadai, akan berdampak pada beban keuangan negara pada masa mendatang. Defisit yang terlalu tinggi dapat berisiko terhadap berkurangnya kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional terhadap kemampuan negara untuk membayar utangnya.

Fraksi PKS memandang besaran defisit anggaran yang semakin meningkat perlu diwaspadai. Meskipun secara persentase terhadap PDB masih di bawah batas maksimal ketentuan Undang-Undang, angka absolut defisit senantiasa meningkat. Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya inovasi untuk melahirkan sumber-sumber penerimaan yang inovatif, serta mengalokasikan anggaran secara bijaksana dengan mengutamakan prinsip efektif, efisien dan ekonomi. Kedepannya diharapkan defisit dapat ditekan, sehingga dapat tercipta kedaulatan fiskal. Defisit harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

70. Fraksi PKS memandang kebijakan defisit keseimbangan primer sebesar Rp63,3 triliun perlu diwaspadai. Postur anggaran dengan kebijakan ini menunjukkan adanya pesimisme kinerja penerimaan anggaran 2025 yang diprediksi tidak akan mampu menutupi beban belanja pemerintah (belum termasuk pembayaran bunga utang). Pemerintah masih akan menerbitkan jumlah utang lebih banyak untuk menutupi belanja negara, bahkan belum termasuk beban bunga utang yang harus dibayar. Defisit keseimbangan primer menandakan masih tingginya ketergantungan APBN terhadap utang baru atau dengan kata lain belum adanya kemandirian fiskal. Efek domino dari defisit keseimbangan primer adalah penyempitan ruang fiskal, di mana alokasi anggaran untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi lebih terbatas. Hal ini akibat biaya untuk menutupi biaya pokok dan bunga utang semakin membengkak. Pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kesinambungan fiskal dan tidak mampu menciptakan keadilan antargenerasi.
71. Fraksi PKS memandang relatif tingginya pembiayaan utang pada 2025 sebesar Rp775,9 triliun. Nilai tersebut meningkat sebesar 40,28 persen dari outlook pembiayaan utang 2024 (Rp 553,1 triliun). Dengan penambahan pembiayaan utang

tersebut, maka akan menempatkan rasio utang terhadap pada kisaran 40,00 persen. Pada postur makro fiskal jangka menengah, rasio utang pada 2025 berkisar 37-82 sd. 38,71 persen, artinya rancangan utang pada RAPBN 2025 lebih tinggi. Rasio tersebut telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh *International Debt Relief* (IDR) sebesar 20-25 persen dan IMF sebesar 25-30 persen. Tingginya pembiayaan utang akan meningkatkan akumulasi utang yang mencapai Rp8.502,69 triliun per Juli 2024. Sebagai catatan tambahan, jumlah tersebut belum termasuk utang BUMN yang juga berpotensi membebani keuangan negara.

72. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah akan dampak langsung dari pemupukan utang yang tidak terkendali, yaitu timbulnya beban bunga utang yang mempersempit ruang fiskal. Beban bunga utang setiap tahunnya meningkat. Pada RAPBN 2025 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp552,9 triliun atau naik 10,8 persen dari *outlook* pembayaran bunga utang 2024. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari rencana belanja subsidi yang hanya mencapai Rp309,1 triliun. Porsi pembayaran beban utang sebesar 20,53 persen dari total belanja pemerintah pusat. Tingginya pangsa anggaran untuk pembayaran beban utang berdampak pada pengurangan alokasi belanja sosial dan produktif (seperti subsidi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan).
73. Fraksi PKS mencermati pembiayaan investasi yang dianggarkan sebesar 154,5 triliun. Nilai tersebut meningkat signifikan dari *outlook* pembiayaan investasi 2024, yaitu sebesar 67,92 persen. Alokasi terbesar pembiayaan investasi ditujukan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp59,5 triliun. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran dalam bentuk PMN. Berdasarkan data histori ditemukan berbagai persoalan pada BUMN penerima PMN, sebagai contoh PT. Krakatau Steel yang terus mengalami kerugian, PT Garuda Indonesia yang memiliki utang dan terjadi *missmanagement* dalam pengelolaannya, PTPN yang menghadapi persoalan keuangan dan operasional.

PMN yang sedianya ditujukan untuk memperkuat BUMN dan mendukung proyek-proyek strategis, tetapi pada penerapannya di beberapa BUMN tidak selalu menghasilkan dampak positif yang diharapkan. Masalah manajemen, inefisiensi, dan ketergantungan pada pemerintah tetap menjadi kendala utama yang harus diatasi agar PMN dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja BUMN dan perekonomian negara.

74. Fraksi PKS kembali mengingatkan Pemerintah untuk selalu mengoptimalkan anggaran secara produktif, efektif dan efisien. Pemerintah dihimbau untuk memanfaatkan dana SAL secara optimal, yang pada akhir tahun 2023 masih memiliki saldo Rp459,5 triliun. Selain itu, Fraksi PKS mengapresiasi dengan tidak dirancangnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun 2025. Hal ini karena SiLPA yang timbul setiap tahunnya dapat menyebabkan akumulasi Saldo Anggaran Lebih (SAL), di mana SAL berasal dari penerbitan utang yang berbiaya tidak murah.

Hadirin yang Kami Muliakan,

Berikut adalah Puisi Karya Mohammad Hatta agar dapat menjadi pengingat dan penyemangat kita semua.

Kepada pemuda Indonesia, yang ingat akan sumpah dan janjinya:

"Indonesia tanah pusaka

Pusaka kita semuanya

Marilah kita mendoa

Indonesia bahagia!

Marilah kita berjanji:

Indonesia abadi!"

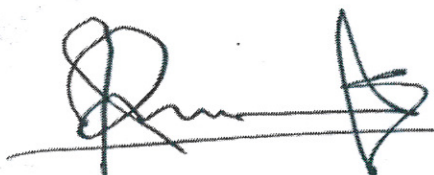
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terkait Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur. Atas perhatian Bapak/Ibu menyimak dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih.

**Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq, Billahi Taufiq wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Jakarta, 15 Safar 1446 H
20 Agustus 2024 M


**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua


Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
No. Anggota: A-449



Sekretaris


Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.PSi.T.
No. Anggota: A-427